

Editor:
Sali Susiana

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika



Judul:

Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii+122 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-979-9052-92-6

Cetakan Pertama, 2013

Penulis:

Faridah Alawiyah

Ujianto Singgih Prayitno

Herlina Astri

Dinar Wahyuni

Sulis Winurini

Elga Andina

Editor:

Sali Susiana

Desain Sampul:

Aiq Banindya Afad

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENGANTAR EDITOR

Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode yang kedua segera akan berakhir pada pertengahan tahun 2014 mendatang. Melalui Kabinet Indonesia Bersatu II, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah dilaksanakan, beberapa di antaranya masih berjalan hingga sekarang. Buku ini berusaha memotret hal itu melalui kepakaran masing-masing penulis yang tergabung dalam Tim Kesejahteraan Sosial Bidang Pengkajian pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tulisan pertama dari Faridah Alawiyah menyoroti mengenai Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut penulis, RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di tengah perjalanan RSBI telah menuai banyak kritik dan digugat ke MK untuk dihapuskan. Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK dan amar putusan MK menyatakan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian label RSBI tidak digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah biasa. Meskipun demikian, penulis mengusulkan agar nilai-nilai positif yang telah menjadi bagian dari sekolah yang pernah menjadi RSBI seperti kedisiplinan, prestasi, budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap dipertahankan.

Pada bab berikutnya, tulisan berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan” yang ditulis oleh Ujjianto Singgih Prayitno fokus pada keberhasilan Pemerintahan SBY periode kedua dalam mengentaskan penduduk miskin. Maret 2008-September 2012 jumlah penduduk miskin berkurang 3,94 juta orang, dari 32,53 juta orang tahun 2008 menjadi 28,59 juta pada tahun 2012. Keberhasilan ini setidaknya ditopang oleh program pembangunan yang berbasis komunitas, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dicanangkan SBY pada

tahun 2007. Hal tersebut menurut penulis memunculkan beberapa model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif yang memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan; tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan kuatnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Mengingat strategi pembangunan komunitas ini masih bersifat program, maka keberlangsungannya dalam menjamin keberlanjutan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu penulis menekankan perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus melanjutkan program ini.

Bab selanjutnya masih menyoroti program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, melalui tulisan berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaan" dari Herlina Astri. Prinsip utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat PNPM adalah menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat. PNPM dilakukan untuk menyatukan dan mengintegrasikan program-program di Kementerian/Lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. PNPM merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Penulis menyatakan bahwa sejak pertama kali PNPM Perdesaan dilaksanakan masih banyak terjadi masalah, yang disebabkan ketidakmerataan dan ketidaktepat sasaran penyaluran bantuan. Untuk itu penulis menyarankan untuk melakukan perbaikan pada setiap tahap agar hasilnya lebih optimal. Pemerintah perlu melakukan pemantapan dan perbaikan pada tahap teknis penyaluran bantuan untuk mengurangi resiko bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu membuat kriteria masyarakat yang akan menerima bantuan ini, misalnya dengan memperbaiki pendataan penduduk miskin yang berhak menerima program bantuan. DPR RI juga memiliki peran dalam memantau pelaksanaan PNPM Perdesaan. Evaluasi program yang dilaporkan pemerintah semestinya menjadi bahan pertimbangan DPR RI untuk menilai masih layak atau tidaknya program tersebut dilakukan, mengingat kurangnya pengawasan terhadap PNPM Perdesaan selama ini menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan program.

Hak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin dalam konstitusi melekat pada setiap orang, termasuk masyarakat miskin. Dinar Wahyuni membahas hal tersebut dalam Bab IV melalui tulisannya berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Masyarakat Miskin". Penulis menyatakan

bahwa upaya pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sisi akses, partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami peningkatan. Target pemenuhan layanan pendidikan dasar tercapai. Namun, hal ini tidak diikuti peningkatan tingkat partisipasi siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Program BOS yang digulirkan untuk mempercepat pencapaian wajar 9 tahun telah menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Dana BOS meringankan biaya pendidikan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga miskin. Namun di sisi lain, program BOS masih menghadapi berbagai kendala. Dari segi jumlah dana, sejumlah sekolah merasa dana BOS belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Dari segi birokrasi, prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana BOS dianggap merepotkan pihak sekolah, sementara jumlah dana BOS tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan berkualitas. Dari segi penyaluran dana, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Program BOS juga rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah bersama dengan orang tua dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara DPR sesuai dengan fungsi anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah bidang pendidikan sehingga dapat menekan resiko penyimpangan anggaran.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan supaya menjadi lebih baik dan lebih bersih. Keberhasilan reformasi salah satunya ditentukan oleh pegawai sebagai aparat birokrasi. Sulis Winurini membahas kesiapan pegawai dalam menghadapi reformasi birokrasi tersebut dalam tulisan pada Bab V berjudul "Sikap Pegawai terhadap Perubahan dalam Reformasi Birokrasi (Studi di Lembaga Negara X)". Lembaga ini merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2011. Sebagai wujud komitmennya tersebut, Lembaga X telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011. Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai dan pejabat eselon melalui dialog terbuka, diskusi interaktif, pemasangan spanduk, *banner* mengenai reformasi birokrasi di lingkungan kerja, serta pelaksanaan pelatihan *Change Management* kepada pejabat eselon. Kegiatan tersebut bisa saja menjadi faktor penyebab positifnya reaksi pegawai terhadap perubahan di dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, penulis juga berpendapat bahwa pihak manajemen perlu menerapkan aturan

perubahan secara konsisten supaya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Mengingat kemauan dan kemampuan adalah dua penyebab utama yang mempengaruhi sikap pegawai, maka pendidikan dan pelatihan dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memperkuat antusiasme mereka mengenai perubahan, manajemen bisa menerapkan penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.

Buku ini ditutup dengan tulisan berjudul “Buku, Pendidikan Dasar, dan Perkembangan Mental Anak” yang ditulis oleh Elga Andina. Menurut penulis, buku pelajaran merupakan media yang penting bagi anak usia pendidikan dasar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. Buku menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang paling dengan dengan peserta didik. Oleh karena itu, konten buku harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Beredarnya buku yang tidak layak ajar di sekolah patut menjadi perhatian karena menjadi hambatan dalam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan manusia yang seutuhnya. Untuk itu, penulis mengusulkan beberapa upaya untuk mengubah manajemen perbukuan nasional, antara lain: peningkatan kualitas sumber daya, adanya Badan Perbukuan yang bebas politik yang dibentuk untuk mengelola semua aktivitas perbukuan untuk sekolah di seluruh Indonesia, dan penegakan hukum bagi pelanggar perbukuan.

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Daftar Isi	vii

BAB I

PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA MASA KABINET INDONESIA BERSATU II

<i>oleh: Faridah Alawiyah</i>	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KERANGKA PEMIKIRAN	2
C. PEMBAHASAN	5
D. KESIMPULAN	14
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB II

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: TINJAUAN TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

<i>oleh: Ujiyanto Singgih Prayitno</i>	19
A. LATAR BELAKANG	19
B. PEMBANGUNAN EKONOMI	22
C. PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN 2009-2013.....	26
D. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	31
E. SIMPULAN DAN SARAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PERDESAAN

<i>oleh: Herlina Astri</i>	43
A. PENDAHULUAN.....	43
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	45
C. PEMBAHASAN	51

D. PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB IV	
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	
<i>oleh: Dinar Wahyuni</i>	61
A. PENDAHULUAN.....	61
B. KERANGKA PEMIKIRAN	64
C. PEMBAHASAN	67
D. PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	79
BAB V	
SIKAP PEGAWAI TERHADAP PERUBAHAN	
DALAM REFORMASI BIROKRASI	
(STUDI DI LEMBAGA NEGARA X)	
<i>oleh: Sulis Winurini</i>	83
A. PENDAHULUAN.....	83
B. LANDASAN TEORI.....	87
C. PEMBAHASAN	90
D. PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA	101
BAB VI	
BUKU, PENDIDIKAN DASAR, DAN	
PERKEMBANGAN MENTAL ANAK	
<i>oleh: Elga Andina</i>	103
A. PENDAHULUAN.....	103
B. KONDISI SISTEM BUKU	
PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	104
C. EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BUKU.....	107
D. DAMPAK PSIKOLOGIS BUKU	
TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK	109
E. SIMPULAN DAN SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
INDEKS	121